

ABSTRAK

Penelitian dalam disertasi ini dilatarbelakangi oleh pandangan bahwa pengampunan pajak (tax amnesty) akan dapat meningkatkan investasi sebagaimana yang diharapkan pemerintah dalam usaha meningkatkan pertumbuhan ekonomi, lebih – lebih pada saat ini tax ratio menunjukkan angka yang rendah sebagai bukti masih banyak wajib pajak yang tidak / belum melaksanakan hak & kewajiban sesuai dengan peraturan perundang – undangan. Pengampunan pajak berupa pembebasan utang pajak beserta sanksi menimbulkan persoalan hukum, sampai sejauhmana akibat hukumnya terhadap asas legalitas dalam sistem hukum perpajakan di Indonesia bagaimana manfaatnya terhadap penerimaan negara dan investasi serta bagaimana konsep pengampunan pajak dalam hubungannya dengan keadilan sebagai upaya pengembangan hukum perpajakan.

Penelitian ini dilakukan secara deskriptif analisis dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yang didukung dengan perbandingan pada beberapa negara. Oleh karena itu data utama yang digunakan adalah data sekunder berupa peraturan perundang – undangan. Dalam hal di kemukakan angka – angka, hal ini hanya sekedar untuk mempertajam permasalahan saja.

Berdasarkan hasil penelitian, ketidaktepatan peraturan baik yang menyangkut substansi maupun bentuk peraturan perundang – undangan akan melemahkan asas legalitas. Dari pengalaman pelaksanaan pengampunan pajak, ternyata pengampunan pajak tidak serta merta meningkatkan penerimaan negara, demikian pula pengampunan pajak tidak secara otomatis dapat meningkatkan investasi. Pengampunan pajak sebagai insentif perlu mendapat dukungan kebijakan dari sektor lainnya sehingga menciptakan iklim investasi yang diharapkan. Keadilan vertikal dan horizontal dalam pengenaan pajak tidak cukup memadai apabila diterapkan dalam pengampunan pajak. Dalam pengampunan pajak yang lebih ditonjolkan adalah keadilan yang membawa kemanfaatan bagi masyarakat dan negara.

ABSTRACT

The research of this dissertation is mainly triggered on the part of the researcher by the view that the tax amnesty will stimulate the investment as expected by the government. This view also believes that the tax ratio has caused the low expectation of the economic growth as there are still some tax payers who have not exercised their rights and obligations in accordance with the law. The tax amnesty such as the acquittal of tax debt and sanction has led to legal problems. These include, to what extent the principle of legality in the tax law system in Indonesia and its impact upon the state's income and investment as the concept of tax pardon in its relation with justice as a means to develop the legal development.

This research is conducted in a descriptive analysis by applying the juridical normative approach supported in a greater extent by a comparative study in a number of countries. Therefore, the main data used is the secondary data such as the legislation on taxation. The quantitative data is used merely to support the description of the problems.

On the basis of the research, the inconsistency of the legislation with regard to their substance will weaken the principle of legislation. On the basis of the availability of the data, it is revealed that the tax amnesty will not ipso facto increase the income of the state, and the tax amnesty needs the support of other sectors which, in that will stimulate the expected investment climate. The vertical and horizontal justice on the tax imposition will not be appropriate if it is applied in the tax amnesty. In that, the tax amnesty is reflecting justice which provides benefit to the people and state.